IMPLEMENTASI PROGRAM PERMAKANAN BAGI LANJUT USIA KELUARGA TUNGGAL TERHADAP PENINGKATAN HIDUP LANSIA DAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL LANSIA KHUSUSNYA LANSIA TERLANTAR OLEH KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) DI KECAMATAN KELUA

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Penyusunan Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik

FATHILLAH MUNADI

NPM. 2022012

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

(STIA) AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama :

NAMA	:	Fathillah Munadi
NPM	:	2022012
PROGRAM STUDI	:	S1 Administrasi Publik
JUDUL SKRIPSI	:	IMPLEMENTASI PROGRAM PERMAKANAN BAGI LANJUT USIA KELUARGA TUNGGAL TERHADAP PENINGKATAN HIDUP LANSIA DAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL LANSIA KHUSUSNYA LANSIA TERLANTAR OLEH KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) DI KECAMATAN KELUA

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui Proposal Skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan kepembimbing Skripsi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, 04 April 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Yusran Fahmi, S.IP., M.AP.	**M. Noor Fuadi, S.Sos, M.AP.**
NUPTK. 6146742643130113	NUPTK. 1152758663200003

YAYASAN BAKTI MUSLIMIN STIA PRODI ADM. PUBLIK AMUNTAI

Mengetahui
Ketua Prodi Administrasi Publik

Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A
NIK. 199211004 201509 021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya. Berkat izin dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta seluruh umat beliau yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, proposal penelitian yang berjudul "Implementasi Program Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal Terhadap Peningkatan Hidup Lansi dan Keberfungsian Sosial Lansia Khususnya Lansia Terlantar Oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kecamatan Kelua." dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan rencana.

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, serta masukan yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Besar harapan penulis agar proposal penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Kelua, 7 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 3
C. Rumusan Masalah 4
D. Tujuan Penelitian 4
E. Manfaat Penelitian 4
BAB ll LANDASAN TEORI
A. Peneliti Terdahulu 6
B. Tinjauan Teoritis 8
C. Kerangka Pemikiran 20
BAB lll METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian 22
B. Pendekatan Penelitian 22
C. Tipe Penelitian 23
D. Data dan Sumber Data 23
E. Desain Operasional Penelitian 25
F. Teknik Pengumpulan Data 27
G. Teknik Analisis Data 28
H. Uji Kredibilitas Data 29
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TEBAL

Tabel 3.1 Informan Penelitian 24

Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian 26

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 21

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998. Tentang kesejahteraan lanjut usia, yang mewajibkan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesejahteraan sosial lansia (usia 60 tahun keatas) agar dapat hidup layak. Implementasi teknisinya di atur melalui peraturan Kemensos, Permensos No. 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial dan kepdirjen rehabilitasi sosial, yang menyasar lansia miskin/terlantar untuk pemenuhan kebutuhan pangan adalah landasan hukum utama dalam pemberian bantuan sosial, termasuk program permakanan bagi lanjut usia tunggal.

Lanjut usia (lansia) merupakan kelompok penduduk yang rentan terhadap berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan kesehatan seiring dengan bertambahnya usia. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika lansia hidup dalam status keluarga tunggal, yaitu lansia yang tidak memiliki pasangan hidup maupun dukungan keluarga inti. Lansia keluarga tunggal, khususnya yang tergolong terlantar, sering kali mengalami keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, salah satunya kebutuhan pangan yang layak dan bergizi. Keterbatasan ini dapat berdampak langsung terhadap kualitas hidup lansia serta menurunkan keberfungsian sosial mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Program Permakanan bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal melibatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai pelaksana di tingkat lokal. Peran Pokmas menjadi sangat penting karena mereka berinteraksi langsung dengan lansia penerima manfaat, mulai dari

pendataan, penyiapan makanan, hingga pendistribusian. Keterlibatan Pokmas diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program karena pelaksanaannya lebih dekat dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Namun demikian, Implementasi program dilapangan tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar pihak, ketepatan sasaran.

Program Permakanan lanjut usia keluarga tunggal dalam 3 tahun terakhir ini di Kabupaten Tabalong Kecamatan Kelua yaitu, pada 2023 penerimaa pemanfaat berjumlah 91 Kpm di Kabupaten Tabalong sedangkan di Kecamatan Kelua 15 Kpm penerima pemanfaat, yang mana mancakup 7 desa, 2 di desa ampukung, 1 bahungin, 1 masintan, 2 pudak setegal, 1 pulau, 6 sungai buluh, dan 2 di desa telaga itar. Pada tahun 2024 berjumlah 58 Kpm di Kabupaten Tabalong sedangkan di Kecamatan Kelua 16 Kpm, yang mencakup 7 Desa, 2 di desa ampukung, 2 bahungin, 1 masintan, 2 pudak setegal, 2 pulau, 4 sungai buluh, dan 3 di desa telaga itar. Pada tahun 2025 berjumlah 59 Kpm di Kabupaten Tabalong sedangkan di Kecamatan Kelua 13 Kpm yang mencakup 7 Desa, 1 di desa ampukung, 2 bahungin, 1 masintan, 2 pudak setegal, 1 pulau, 4 sungai buluh, dan 2 di desa telaga itar. (Sumber Data : Pokmas (Kelompok Masyarakat) Lansia Berkah Sejahtera.

Program permakanan bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal telah dilaksanakan dan dalam keputusan direktur jenderal kegiatan untuk memberikan makanan yang terdiri dari nasi/sejenisnya (menyesuaikan dengan daerah masing masing), lauk pauk, sayur, buah, dan air mineral yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali sehari dalam 1 kali pengantaran. Lanjut usia dalam penerima adalah seseorang yang telah mencapai usia 70 tahun ke atas dan

penerima adalah lanjut usia yang terdaftar seorang diri dalam kartu keluarga. Dalam pengantaran paket makanan pengirim permakanan dilakukan mulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 10.00 waktu setempat. Dalam pelaksanaan program permakanan masih ada beberapa permasalahan yaitu:

1. Keterlambatan petugas kirim untuk mengantar paket permakanan
2. Menu makanan yang disediakan terkadang kurang sesuai dengan kondisi lansia
3. Syarat penerima permakanan program ini harus lansia tunggal tetapi masih ada lansia yang tinggal sama keluarga

Berdasarkan uraian tersebut, membuat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " Implementasi Program Permakanan bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal terhadap Peningkatan Hidup Lansia dan Keberfungsian Sosial Lansia Khususnya Lansia Terlantar oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kecamatan Kelua". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kehidupan lansia, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi peningkatan kualitas program di masa mendatang.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang di teliti, maka perlu dilakukan pembatasan terhadap objek kajian tentang " Implementasi Program Permakanan Bagi Lanju Usia Keluarga Tunggal Terhadap Peningkatan Hidup Lansia dan Keberfungsian Sosial Lansia Khususnya Lansia Terlantar Oleh Kelompok Masyarakat

(Pokmas) di Kecamatan Kelua". Dalam menganilisis pelaksanaan program tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh George C. Edwards lll (Subianto,2020:70), menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa unsur yang saling berkaitan. yaitu

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Sikap Pelaksana
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal Terhadap Hidup Lansia Dan Keberfungsian Sosial Lansia Khususnya Lansia Terlantar Oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS) Di Kecamatan Kelua?
2. Apa Saja Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal Terhadap Hidup Lansia Dan Keberfungsian Sosial Lansia Khususnya Lansia Terlantar Oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS) Di Kecamatan Kelua?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengatahui Implementasi Program Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal Terhadap Hidup Lansia Dan Keberfungsian Sosial Lansia Khususnya Lansia Terlantar Oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS) Di Kecamatan Kelua.
3. Untuk Mengatahui Apa Saja Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal Terhadap Hidup

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

Lansia Dan Keberfungsian Sosial Lansia Khususnya Lansia Terlantar Oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS) Di Kecamatan Kelua?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial dan kebijakan sosial bagi lanjut usia. Penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai implementasi program kesejahteraan sosial.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran, tantangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pokmas dalam melaksanakan Program Permakanan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan pembelajaran bagi Pokmas untuk meningkatkan kapasitas, koordinasi, serta kualitas pelayanan kepada lansia penerima manfaat dan dapat mendorong perbaikan pelaksanaan Program Permakanan.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

BAB ll
LANDASAN TEORI

A. Peneliti Terdahulu

1. Ira Dewi Haryani (2024), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dalam penelitian yang berjudul " **Implementasi Program Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal Dalam Kondisi Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat** ". Penelitian ini dilatar belakangi Program pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia adalah salah satu program pemerintah melalui Kementrian Sosial RI untuk kesejahteraan sosial lanjut usia khususnya lanjut usia keluarga tunggal yang berada dalam kondisi miskin. Implementasi program permakanan ini adalah di tingkat Provinsi sampai Kabupaten yang disalurkan melalui Dinas Sosial di masing-masing Kabupaten tidak terkecuali Kabupaten Lombok Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program pemberian permakanan lanjut usia terlantar yang berada dalam kondisi miskin. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari, kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat beserta staf, pendamping sosial, ketua kelompok masyarakat (Pokmas), lanjut usia penerima manfaat program, serta pihak pendistribusi makanan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini terlaksanan dengan baik, tepat sasaran dan di nilai dapat memberikan perlindungan serta pemeliharaan kesejahteraan bagi lanjut usia. Kesimpulan implementasi program permakanan lanjut usia berjalan sesuai dengan petunjuk teknis program dengan merujuk pada teori komunikasi,

sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, dengan biaya pendistribusian makanan yang sangat minim yakni Rp2.000,- (dua ribu rupiah) untuk dua kali makan per hari/orang dalam satu kali pengantaran. Menjadi tidak efektif apabila disamakan antara pokmas yang jangkauan cukup dekat jika dibandingkan dengan pokmas yang jaraknya lumayan jauh dari lokasi masing-masing pokmas.

2. Hana Nida Hanifah (2024),Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Indonesia dalam penelitian yang berjudul " **Pengelolaan Program Bantuan Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal di Desa Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat** ". Penelitian ini dilator belakangi Lanjut usia keluarga tunggal merupakan kelompok rentan yang menghadapi keterbatasan fisik, ekonomi, dan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan bergizi. Program permakanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial melalui pendekatan berbasis masyarakat menjadi salah satu solusi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan program permakanan bagi lansia keluarga tunggal di Desa Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah berdasarkan empat fungsi manajemen George R. Terry, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap delapan informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan secara sistematis namun belum optimal dan belum terstandarisasi di semua aspek manajemen. Permasalahan utama terletak pada ketiadaan asesmen individual, ketidakjelasan standar rekrutmen Pokmas,

ketiadaan SOP teknis dan K3, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya asesmen kebutuhan lansia, penyusunan SOP, serta penguatan kelembagaan Pokmas dan sistem pengawasan berbasis.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Secara etimologis kata implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu " *to implement* ". Yang artinya menyediakan sarana bagi pelaksana sesuatu dan " *to partical effect* " yang artinya untuk menimbulkan efek atau dampak. Sesuatu yang di laksanakan untuk menimbulkan efek atau dampak itu dapat berupa peraturan undang – undang (Marwiyah, 2022:36). Implemtasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia mengandung arti pelaksanaan, penerapan, (pertemuan kedua arti tersebut bermaksud mencari bentuk). Sedangkan menurut Kusnandar di dalam tulisannya mengartikan implemtasi adalah sebagai penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan maupun nilai dan sikap.

Implementasi Kebijakan Publik Merupakan salah satu dimensi dalam proses kebijakan publik, yang juga sangat menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan serta dapat diterima oleh publik (Kadji,2015:45).

Kebijakan publik merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah tersebut (Marwiyah,2022:12)

Implementasi ini merupakan suatu penerapan atau juga sebuah tindakan yang dilakukan dengan berdasarkan suatu rencana yang telah atau sudah disusun atau dibuat dengan cermat serta juga terperinci sebelumnya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa pengertian implementasi merupakan suatu tindakan atau juga bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang sudah dirancang dengan matang. Dengan kata lain, implementasi ini hanya dapat dilakukan apabila sudah terdapat perencanaan. Dari penjelasan itu kita dapat melihat bahwa implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem, jadi penerapan implementasi itu harus sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat supaya hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Sesuatu yang di laksanakan untuk menimbulkan efek atau dampak itu berupa peraturan undang – undang, keputusan dan kabijakan yang dibuat oleh lembaga pamerintah dalam kehidupan kenegaraan. Sedangkan implementasi kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Definisi yang umum di pakai menyangkut kebijakan implementasi, implementasi adalah tindakan - tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu, pejabat – pejabat, atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sedangkan menurut George C. Edwards,Implementasi Kebijakan Publik ada 4 variabel, yaitu (Subianto,2020:70) :

1) Komunikasi

Komunikasi sangat penting, karena suatu program hanya dapat diimplementasikan dengan baik, jika jelas bagi pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi (clarity) serta konsentrasi informasi yang disampaikan.

2) *Resources* (Sumber Daya)

Resources (Sumber Daya) Mencakup empat komponen yakni, Staff yang cukup (kuantitas & kualitas); informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan; *Authority* (kewenangan) guna melaksanakan tugas dan tanggung-jawab serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

3) *Disposisi* (Sikap Pelaksana)

Adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi implementor, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi.

4) Struktur Birokrasi

Yaitu terdapatnya suatu SOP (*Standard Operating Procedures*), tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program. Jika hal ini tidak ada, maka sulit untuk mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah bersifat ad-hoc, memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang standar. Fragmentasi yang sering terdapat di dalam organisasi harus dihindari dan diatasi melalui sistem koordinasi.

Dari pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu bentuk tindakan yang akan

berupa dengan keputusan yang telah diterapkan untuk menyelesaikan suatu masalah yang akan lebih menjamin disuatu hari nanti.

b. Tujuan Implementasi

Dalam rangka memastikan kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, implementasi ini merupakan aktivitas atau kegitan yang dilakukan secara sistematis serta terikat oleh mekanisme untuk dapat mencapai tujuan tertentu implementasi kebijakan publik, maka beberapa tujuan pelaksana adalah:

1) Bertujuan untuk merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat dilaksanakan secara konkret dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
2) Bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, dan target kebijakan dapat tercapai sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan oleh pembuat kebijakan.
3) Bertujuan untuk mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat
4) Bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
5) Bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
6) Bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok sasaran.

7) Bertujuan untuk mengetahui hambatan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.

Tujuan implementasi kebijakan pada dasarnya adalah memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang benar-benar dapat dilaksanakan secara nyata dan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Kebijakan tidak hanya berhenti sebagai dokumen hukum atau keputusan administratif, tetapi diterjemahkan ke dalam tindakan konkret yang menyentuh kehidupan masyarakat. Melalui implementasi, arah, visi, dan tujuan kebijakan diwujudkan dalam program, kegiatan, serta pelayanan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh kelompok sasaran.

Jika dikaitkan dengan judul "Implementasi Program Permakanan bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Lansia dan Keberfungsian Sosial Lansia khususnya Lansia Terlantar oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kecamatan Kelua", maka tujuan implementasi kebijakan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tujuan implementasi Program Permakanan bagi lanjut usia keluarga tunggal adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan program bantuan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah benar-benar terlaksana secara efektif di tingkat lokal, khususnya di Kecamatan Kelua. Program ini bertujuan memenuhi kebutuhan dasar lansia terlantar, terutama kebutuhan pangan yang layak dan bergizi, sehingga dapat menunjang kesehatan fisik dan ketahanan tubuh lansia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan

dasar tersebut menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup lansia yang hidup sendiri dan berada dalam kondisi rentan secara sosial maupun ekonomi.

Selain pemenuhan kebutuhan pangan, implementasi program ini juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia secara menyeluruh. Melalui pelaksanaan program permakanan yang berkelanjutan, lansia diharapkan dapat hidup lebih sehat, merasa diperhatikan, dan memiliki rasa aman dalam menjalani masa tua. Rasa kepedulian yang ditunjukkan melalui program ini dapat mengurangi perasaan kesepian, keterasingan, dan ketidakberdayaan yang sering dialami oleh lansia keluarga tunggal dan lansia terlantar.

c. Fungsi Implementasi Kebijakan

Fungsi Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kebijakan, karena pada tahap inilah kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Tanpa adanya implementasi yang baik, kebijakan publik hanya akan berhenti pada tataran dokumen dan tidak memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan program sangat ditentukan oleh efektivitas implementasinya, yang dapat dianalisis melalui empat variabel Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini menjadi dasar untuk memahami fungsi implementasi program secara menyeluruh.

1) Komunikasi

Fungsi implementasi dari aspek komunikasi adalah memastikan informasi mengenai program permakanan tersampaikan secara jelas kepada semua pihak, termasuk pemerintah, Pokmas sebagai pelaksana, dan lansia penerima manfaat. Komunikasi yang efektif berfungsi untuk memberikan pemahaman yang sama mengenai tujuan, prosedur, mekanisme pendistribusian makanan, serta hak dan kewajiban lansia. Fungsi ini juga membantu mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan partisipasi serta kesadaran lansia dalam menerima bantuan, sehingga program dapat berjalan sesuai rencana.

2) Sumber Daya

Fungsi implementasi dari aspek sumber daya adalah memastikan tersedianya sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program. Pokmas sebagai pelaksana program membutuhkan dukungan sumber daya yang cukup agar distribusi makanan dapat dilakukan secara tepat waktu, merata, dan berkelanjutan. Fungsi ini juga mencakup pengelolaan sumber daya secara optimal agar program dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup lansia.

3) Disposisi

Fungsi implementasi dari aspek disposisi adalah mendorong sikap dan komitmen positif pelaksana, dalam hal ini Pokmas, agar menjalankan program dengan penuh tanggung jawab, peduli, dan profesional. Disposisi yang baik berfungsi untuk memastikan bahwa bantuan permakanan tidak

hanya disalurkan secara administratif, tetapi juga dilandasi empati sosial sehingga keberfungsian sosial lansia, seperti keterlibatan sosial dan rasa dihargai, dapat ditingkatkan.

4) Struktur Birokrasi

Fungsi implementasi dari aspek struktur birokrasi adalah menciptakan mekanisme kerja yang jelas, terkoordinasi, dan sesuai prosedur antara pemerintah, Pokmas, dan pihak terkait. Struktur birokrasi yang efektif berfungsi untuk memperlancar perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan program permakanan. Fungsi ini memastikan pelaksanaan program berjalan tertib, akuntabel, dan selaras dengan tujuan kebijakan perlindungan lansia.

Fungsi implementasi kebijakan publik memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Melalui pelaksanaan kebijakan yang terencana, terkoordinasi, dan berorientasi pada tujuan, kebijakan publik diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjawab permasalahan publik yang menjadi latar belakang perumusannya. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya dipahami sebagai proses administratif semata, tetapi sebagai upaya nyata untuk mewujudkan tujuan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

d. Model Implementasi Kebijakan Publik

Model yang digunakan oleh George C. Edward lll dimana ada 4 variabel yaitu :

1) Variabel Komunikasi, Variabel komunikasi menekankan pentingnya penyampaian informasi yang jelas dan konsisten dari pembuat kebijakan kepada pelaksana. menekankan bahwa komunikasi yang efektif tidak hanya mencakup penyebaran dokumen atau instruksi formal, tetapi juga pemahaman yang mendalam oleh pelaksana tentang tujuan, sasaran, prosedur, serta peran mereka dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa komunikasi yang memadai, pelaksana dapat salah menafsirkan maksud kebijakan, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas implementasi. Komunikasi yang baik juga memungkinkan adanya umpan balik dari pelaksana kepada pembuat kebijakan, sehingga setiap hambatan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan dapat segera diperbaiki. Dengan demikian, komunikasi menjadi jembatan penting antara perumusan kebijakan dan pelaksanaan nyata di lapangan.
2) Variabel Sumber Daya, Sumber daya merupakan variabel yang menunjukkan sejauh mana pelaksana memiliki akses terhadap segala bentuk dukungan yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan. menekankan bahwa ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya, baik itu tenaga manusia yang kompeten, anggaran yang cukup, sarana dan prasarana pendukung, maupun waktu yang memadai, menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi. Tanpa sumber daya yang memadai, pelaksana akan mengalami kesulitan dalam menerapkan kebijakan sesuai rencana, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat gagal tercapai. Selain itu, Edward III menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara efisien dan efektif, karena

sumber daya yang terbatas harus dimaksimalkan untuk menghasilkan dampak yang optimal bagi penerima manfaat.

3) Variabel Disposisi, Disposisi pelaksana adalah variabel yang berkaitan dengan sikap, motivasi, dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan yang mereka jalankan., keberhasilan implementasi sangat bergantung pada apakah pelaksana memiliki disposisi yang positif, yang ditandai dengan kesediaan untuk bekerja secara proaktif, bertanggung jawab, dan peduli terhadap tujuan kebijakan. Sebaliknya, jika pelaksana menunjukkan disposisi negatif, seperti ketidakpedulian, resistensi, atau kurangnya motivasi, hal ini dapat menjadi penghambat signifikan dalam proses implementasi. Disposisi yang baik tidak hanya memengaruhi kinerja individu pelaksana, tetapi juga memengaruhi interaksi mereka dengan penerima manfaat dan pihak lain yang terlibat, sehingga berdampak pada keberhasilan keseluruhan pelaksanaan kebijakan.

4) Variabel Struktur Birokrasi, Struktur birokrasi merupakan variabel yang mencakup aturan, prosedur, mekanisme kerja, dan hierarki organisasi yang mengatur pelaksanaan kebijakan. Edward III menekankan bahwa struktur birokrasi yang jelas dan terkoordinasi mempermudah pelaksana untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Struktur birokrasi yang efektif memungkinkan adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat, memperjelas alur pelaksanaan, dan meminimalkan tumpang tindih tugas. Sebaliknya, struktur birokrasi yang rumit, tumpang tindih, atau tidak fleksibel dapat menjadi penghambat yang signifikan.

2. Lanjut Usia (Lansia)

a. Pengertian Lanjut Usia

Lanjut usia atau lansia adalah fase kehidupan yang ditandai oleh penurunan fungsi fisik, psikologis, dan sosial seseorang akibat proses penuaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lanjut usia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas tetapi program ini harus di atas umur 70 tahun ke atas.

Selain aspek biologis, lansia juga menghadapi perubahan psikologis, seperti meningkatnya risiko depresi, kesepian, atau ketergantungan pada orang lain. Perubahan sosial pun terjadi, terutama bagi lansia yang hidup sendiri atau dalam keluarga tunggal, karena mereka cenderung kehilangan interaksi sosial yang rutin, dukungan keluarga, dan akses terhadap layanan sosial. Kondisi ini membuat lansia kelompok ini lebih rentan terhadap keterlantaran, kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar, serta berkurangnya keberfungsian sosial.

Organisasi Kesehatan Dunia **(**WHO, 2015**)** menyebut lansia sebagai individu yang memasuki tahap akhir kehidupan produktif, yang memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan hak-haknya, termasuk kesehatan, gizi, perlindungan sosial, dan partisipasi dalam kegiatan sosial. Lansia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya secara fisik dan sosial memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan dapat terus berperan dalam masyarakat. Oleh karena itu, berbagai program sosial, seperti Program Permakanan bagi Lansia Keluarga Tunggal, menjadi strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan fisik,

psikologis, dan sosial lansia, terutama bagi mereka yang kurang mendapat dukungan keluarga atau masyarakat.

b. Program Permakanan Lanjut Usia

Permakanan adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makanan yang terdiri dari nasi/sejenisnya,lauk pauk, sayur, buah, dan air mineral yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali sehari dalam 1 (satu) kali pengantaran. Penerima pemanfaat adalah Lanjut Usia yang telah terdaftar dalam DTKS, sasaran penerima program untuk lanjut usia dengan kriteria sebagai berikut:

1) Miskin atau tidak mampu
2) Berusia 70 tahun keatas
3) Terdaftar dalam DTKS
4) Bukan berstatus sebagai pensiunan /istri/suami pegawai negeri sipil dan purnawirawan tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia
5) Terdaftar seoarang diri didalam kartu keluarga
6) Memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK).
7) Di rekomendasikan oleh camat/kepala dinas sosial setempat sebagai calon penerima pemanfaat.

c. Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Kelompok Masyarakat (Pokmas) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam konteks Program Permakanan bagi Lanjut Usia, Pokmas berperan sebagai pelaksana

kegiatan yang meliputi pendataan lansia, pengelolaan distribusi makanan, serta pendampingan lansia.

Berdasarkan teori partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam program sosial dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program. Pokmas menjadi jembatan antara pemerintah dan lansia dalam memastikan program permakanan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur logika yang menghubungkan teori, fakta, dan penelitian, pemikiran seseorang yang sedang di pahami agar dijadikan acuan dalam memecahkan masalah yang sedang di teliti, sesuai dengan teori yang di kemukakan menurut Teori George C. Edwards lll, (Subianto , 2020:70) tentang implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat variabel :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi, dan
4. Struktur birokrasi.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diajukan kerangka pemikiran sebagai berikut .

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

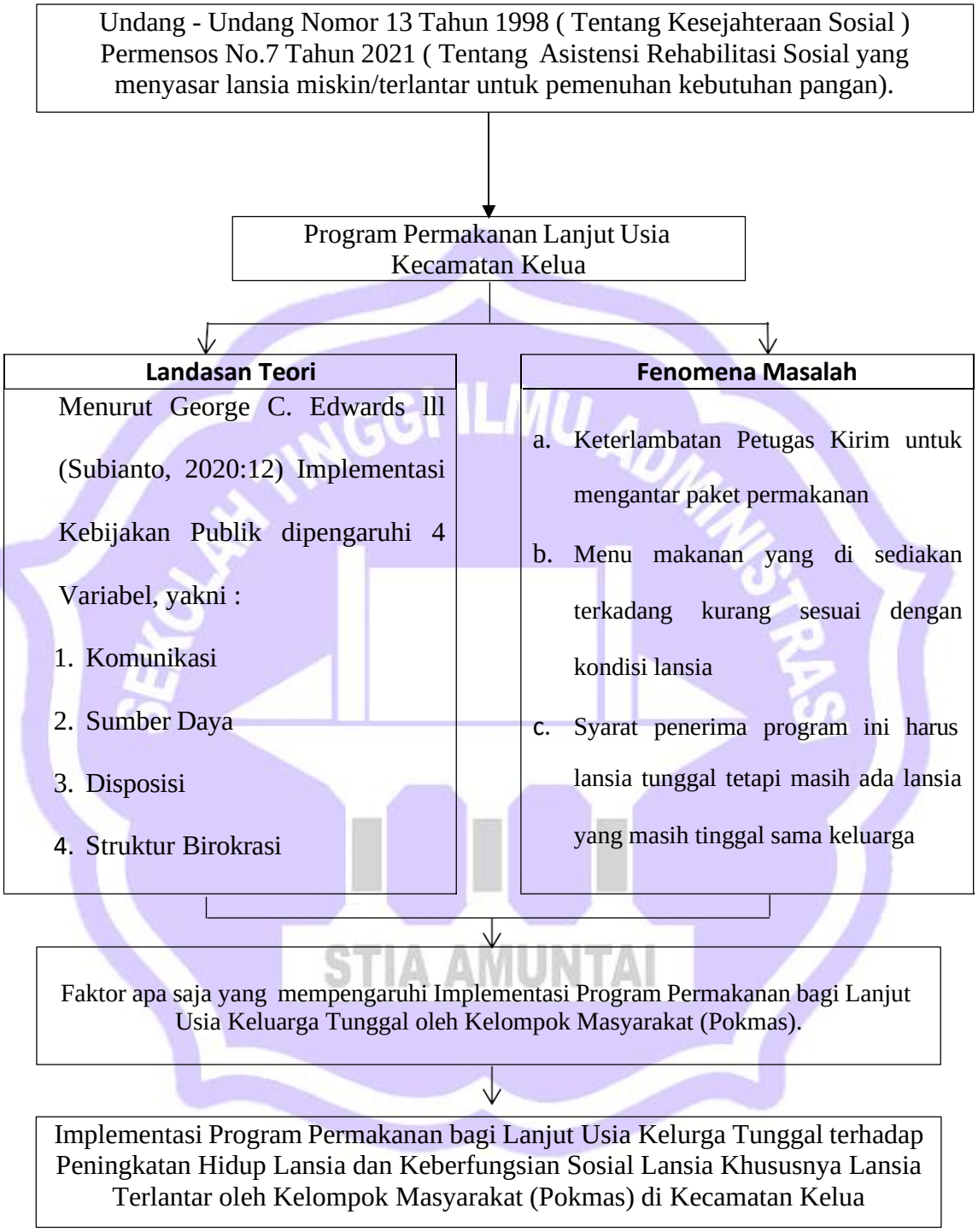

BAB lll
METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilaksanakan untuk memperoleh data yang akan di pertanggungjawabkan, penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, dan di Kantor / Sekretarian Pokmas Lansia Berkah Sejahtera yang beralamat Jl A. Yani No 1 Kelurahan Pulau Kecamatan. Kelua Kode Pos 71552.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi Program Permakanan bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup dan keberfungsian sosial lansia, khususnya lansia terlantar yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kecamatan Kelua**.** Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penggalian makna, pengalaman, persepsi, dan interaksi sosial para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program permakanan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana program dijalankan, bagaimana lansia sebagai penerima manfaat merasakan program tersebut, serta bagaimana peran Pokmas dalam mendukung keberlangsungan dan efektivitas program.

Menurut Sugiyono (2020:15) , Metode penelitian kualitatif adalah di sebut metode interpretive karena data ditemukan dilapangan, metode yang berlandasankan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada

kondisi obyek yang almiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

C. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Tipe penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, mengumpulkan data dan memahami mengenai Program Permakanan bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal, agar memperoleh gambaran yang utuh dan meliputi proses pelaksanaan program, peran Pokmas, pengalaman lansia sebagai penerima manfaat, serta interaksi sosial yang terbentuk selama program berlangsung.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Adapun Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Menurut Nilawati (2023:22) Data primer mengacu pada data tangan pertama yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Beberapa sumber dari data primer adalah survei, observasi, kuesioner, kelompok fokus, studi kasus dan wawancara.

b. Data Sekunder

Menurut Nilawati (2023:22) Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak yang tidak terkait dengan studi penelitian tetapi mengumpulkan data tersebut untuk beberapa tujuan lain dan pada waktu yang berbeda di masa lalu. Jika peneliti menggunakan data tersebut maka ini menjadi data sekunder untuk pengguna saat ini. Sumber data sekunder

adalah pemerintah situs web publikasi, buku, artikel jurnal, catatan internal.

2. Sumber Data

Sumber data dari peneliti ini diperoleh dari informan, Informan penelitian adalah pihak-pihak yang dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria dan kebutuhan penelitian.

Menurut Sugiyono (2020:133) Simpel Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dan sesuai yang kita butuhkan, misalnya akan melaksanakan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Informan yang di ambil pada penelitian ini adalah sebagai berikut

Tabel 3. 1

Informan Penelitian

NO	Nama	Jumlah
1	Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas)	1
2	Pengawas Pelaksana, Tksk Kelua	1
3	Petugas pemasak permakanan	2
4	Petugas Pengirim Permakanan	2
5	Penerima manfaat	5
6	Masyarakat	2
Jumlah		13

E. Desain Operasional Penelitian

Berdasarkan Judul penelitian "Implementasi Program Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal terhadap Peningkatan Lansia dan Keberfungsian Sosial Lansia Khususnya Lansia Terlantar Oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kecamatan Kelua". Maka dirancanglah suatu desain operasional penelitian untuk mengatahui bagaimana implemetasi program permakanan tersebut :

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

Tabel 3.2

Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Implementasi Kebijakan Menurut Teori George C. Edwards lll (Subianto, 2020:70) 1) Komunikasi 2) Sumber Daya 3) Disposisi 4) Struktur Birokrasi	• Transmisi Infomasi • Kejalasan Informasi • Konsistensi Informasi	• Kecepatan penyampaian informasi • Bahasa mudah dipahami • Kesesuain lisan dan tertulis
	• Waktu • Sarana & Prasarana • Sdm	• Ketepatan jadwal • Kelengkapan fasilitas • Kemampuan petugas dalam menyiapkan dan menyalurkan
	• Kejujuran • Tanggung Jawab • Responsivitas	• Keterbukaan • Ketepatan penerima • Cepat merespon perubahan data
	• SOP • Koordinasi • Mekanisme pengawasan	• Kejelasan prosedur • Kerja sama, komunikasi • Pengawasan jadwal, pengecekan kualitas makanan

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengatahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan menurut Sugiyono (2020:296).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Ketiga teknik pengumpulan data ini diharapkan dapat melengkapi, sehingga diperoleh informasi yang diharapkan.

1. Wawancara

wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Interview digunakan peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang terhadap sesuatu. Ditinjau dari pelaksanaannya, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci Nilawati (2023:24). Adapun tahapan wawancara yang dilaksanakan antara lain :

a. Menentukan tujuan wawancara
b. Menentukan siapa saja yang akan menjadi informan penelitian
c. Mempersiapkan pedoman wawancara
d. Melakukan proses wawancara dengan informan, dengan menggunakan

beberapa media pendukung, seperti voice recorder, video, buku catatan untuk mencatat poin penting, dll.

e. Interpretasi hasil wawancara

f. Melakukan transkrip wawancara

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang mengkaji, dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, Dokumen yang di maksud berupa dokumen tertulis, gambar, rekaman, dan arsip resmi yang memuat informasi relevan dengan fokus penelitian.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti setelah itu peneliti bias menggambarkan masalah yang terjadi yang bias dihubungkan dengan teknik pengumpulan data yang lain dan hasil yang diperoleh di hubungkan dengan teori dan peneliti terdahulu menurut Sahir (2022:46)

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2020:320) dalam penelitian kualitatif analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katogori, menjabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipejari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2020:365) Bahwa uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, traingulasi, , analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan member check.

1. Perpanjangan Pengamatan

   Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber daya yang pernah ditemui maupun yang baru dan hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada infomasi yang disembunyikan lagi.

2. Meningkatkan Ketekunan

   Berati melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinan bungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti.

3. Triangulasi

   Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tringulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dam waktu.

4. Analisis Kasus Negatif

   Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu, melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertantangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertantangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dipercaya.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Menggunkan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditentukan oleh peneliti. Data tentang integrase manusia, atau gambaran suatu keadaan, dan foto-foto. Alat alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti Handphone, alat rekam suara untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan peneliti.

6. Member Check

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informasi.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (1998). Undang Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Anonim. (2021). Permensos Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Anonim. (2022). *Pedoman Skripsi*. Amuntai: STIA Amuntai.

Anonim. (2022). Pedoman Pelaksanaan Pemberian Pemakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal dan Penyandang Disibilitas Keluarga Tunggal. Jakarta:Kementerian Sosial

Marwiyah,S. (2022). *Kebijakan publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Semarang: CV.Mitra Ilmu

Nilawati & Fati,N. (2023). *Metodologi penelitian*. Sumatera Barat: Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh .

Sahir, S. H. (2022). *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia.

Subianto, A. (2020). *Kebijakan publik: Tinjauan Perancanaan, Implementasi dan Evaluasi.* Surabaya: Brilian Internasional.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, Kuantitatif,dan R & D.* Bandung: Alfabeta.